

Hasil Laporan Evaluasi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2015

Penilaian		Penjelasan	Jawaban	Nilai	Presentase (Bobot / Nilai)	Nama/ Nomor Dokumen Pendukung
A. PROSES (60).				46.72	77.86%	
I.Manajemen Perubahan				5	100%	
1. Tim Reformasi Birokrasi				1	100%	
a	Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk	a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi namun belum sesuai kebutuhan organisasi c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi	A	1		Keputusan Sekda No 14/SEKDA/2014 tgl 16 April 2014 ttg "Pembentukan Tim Mindset Dan Culture Set Aparatur Reformasi Birokrasi Pemkot Yk 2014"
b	Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi	a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja d. Seluruh tugas belum dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja	A	1		Notulen rapat koordinasi, tatakala kegiatan
c	Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Seluruh rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi	A	1		laporan hasil monev tahunan
2. Road Map Reformasi Birokrasi				1	100%	
a	Road Map telah disusun dan diformalkan	Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal	Ya	1		Keputusan Walikota Yogyakarta No. 406/KEP/2013 ttg Penetapan Road Map RB Th. 2012 s/d 2016 di Lingkungan Pemkot Yk.
b	Road Map telah mencakup 8 area perubahan	a. 4 area atau lebih b. 1-3 area c. tidak ada	A	1		Keputusan Walikota Yogyakarta No. 406/KEP/2013 ttg Penetapan Road Map RB Th. 2012 s/d 2016 di Lingkungan Pemkot Yk.

	c	Road Map telah mencakup "quick win"	a. Quick win ada sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat b. Quick win ada tapi tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak dapat diselesaikan dalam waktu cepat c. Belum ada quick win	A	1		Keputusan Walikota Yogyakarta No. 406/KEP/2013 ttg Penetapan Road Map RB Th. 2012 s/d 2016 di Lingkungan Pemkot Yk.
	d	Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh unit organisasi	a. Seluruh unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map b. Sebagian besar unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map c. Sebagian kecil unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map d. Belum ada organisasi yang dilibatkan dalam penyusunan Road Map	A	1		Notulen penyusunan roadmap
	e	Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map kepada anggota organisasi	a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map d. Seluruh anggota organisasi belum mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map	A	1		Notulen sosialisasi, distribusi kepal Keputusan Walikota Yogyakarta No. 406/KEP/2013 ttg Penetapan Road Map RB Th. 2012 s/d 2016 di Lingkungan Pemkot Yk kepada seluruh SKPD/ unit kerja
3. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi					2	100%	
	a	PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	a. Seluruh PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik b. Sebagian besar PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik c. Sebagian kecil PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik d. Seluruh PMPRB belum direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	A	1		Kepwal No. 47 th 2014 ttg Pembentukan Tim pelaksana Kegiatan Kormonev PPK , Lampiran IV Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Online dan lampiran V Tim Asesor Utama PMPRB Online, Kepwal no 46 Th 2014 Ttg Penunjukan Asesor PMPRB Online pada SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, Kep Inspektur No. 33/KEP/2014 ttg Pendelegasian Wewenang Asesor PMPRB Online Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, DPA Inspektorat Kota Yk.
	b	Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja	a. Seluruh aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi b. Sebagian besar aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi c. Sebagian kecil aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi d. Seluruh aktivitas PMPRB belum dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi	A	1		Notulen rapat koordinasi persiapan pelaksanaan PMPRB, rapat koordinasi melibatkan seluruh SKPD/ unit kerja pengampu 8 area perubahan dalam RB
	c	Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asesor PMPRB	a. Seluruh Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan b. Sebagian besar Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan c. Sebagian kecil Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan d. Seluruh Tim Asesor PMPRB belum mendapatkan pelatihan	A	1		Bimtek bagi Asesor SKPD sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali untuk Tim RB dilaksanakan pd bulan Nopember 2012.

	d	Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<p>a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB.</p> <p>b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB.</p> <p>c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain</p> <p>d. Partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB belum ada.</p>	A	1		Kepwal No. 47 th 2014 ttg Pembentukan Tim pelaksana Kegiatan Kormonev PPK , Lampiran IV Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Online dan lampiran V Tim Asesor Utama PMPRB Online, Kepwal no 46 Th 2014 Ttg Penunjukan Asesor PMPRB Online pada SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, Kep Inspektur No. 33/KEP/2014 ttg Pendelegasian Wewenang Asesor PMPRB Online Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta,
	e	Apakah koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi?	<p>a. Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadap seluruh kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi</p> <p>b. Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadap sebagian kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi</p> <p>c. Koordinator assessor belum melakukan reviu kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi</p>	A	1		Notulen FGD, Panel 1 dan 2, untuk tahun 2014 Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan PMPRB Online dalam 2 versi.
	f	Apakah para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi?	<p>a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas</p> <p>b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas;</p> <p>c. Belum ada konsensus yang dicapai oleh para koordinator assessor</p>	A	1		FGD dan Panel 1 pada PMPRB versi 1 dan FGD pada PMPRB versi 2
	g	Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan	<p>a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan</p> <p>b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum dikomunikasikan dan dilaksanakan</p> <p>c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)</p>	A	1		Laporan hasil evaluasi dan TL RB, hasil monev RB
4. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja					1	100%	
	a	Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	<p>a. seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p> <p>b. sebagian besar pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p> <p>c. sebagian kecil pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p> <p>d. Seluruh jajaran pimpinan tertinggi belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p>	A	1		komitmen Walikota dalam bentuk adanya kebijakan-kebijakan pendukung RB seperti Perwal Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi dan Kepwal Nomor 441 Tahun 2014 tentang Pembentukan Agen perubahan Reformasi Birokrasi
	b	Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan	<p>a. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala</p> <p>b. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait</p> <p>c. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai</p> <p>d. Ada media komunikasi namun cakupannya terbatas pada pegawai tingkatan tertentu</p> <p>e. Belum ada media komunikasi untuk mensosialisasikan pelaksanaan reformasi birokrasi</p>	A	1		Pengarahan pada Apel bulanan, Rapat dinas pimpinan SKPD/Unit Kerja, Rapat Koordinasi Terbatas.

	c	Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model	a. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi, dan sudah mengikuti pelatihan sebagai role model dalam perubahan b. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change namun secara formal belum dilakukan d. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change	A	1		Perwal Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi dan Kepwal Nomor 441 Tahun 2014 tentang Pembentukan Agen perubahan Reformasi Birokrasi dan telah dilakukan pelatihan Agent of Change bagi SKPD pada bulan Agustus 2014
	Rencana Aksi		Berkaitan dengan Manajemen Perubahan yaitu Tim Reformasi Birokrasi, Road Map Reformasi Birokrasi, Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja di Pemerintah Kota Yogyakarta telah diimplementasikan semua. Namun Pemerintah Kota Yogyakarta tetap komit untuk tetap menyempurnakan dlm pelaksanaannya.				
II.PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN						5	100%
1. Harmonisasi						2.5	100%
	a	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron	a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron	A	1		Hasil pemetaan terhadap Peraturan Daerah
	b	Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron	a. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis b. Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah dilakukan, namun belum selesai c. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron	A	1		Rekapitulasi data peraturan perundang-undangan yang sudah direvisi/disempurnakan
2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan						2.5	100%
	a	Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi	a. Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikan b. Ada persyaratan tersebut namun baru sebagian diimplementasikan c. Ada persyaratan tersebut namun belum diimplementasikan d. Belum ada persyaratan tersebut	A	1		SOP produk hukum masih berupa Keputusan Kepala Bagian Hukum blm berupa Keputusan Walikota, Jadwal kegiatan jasa konsultasi dan SE 065/13/SE/2014
	b	Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	a. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tidak berkala c. Belum pernah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	A	1		notulen rapat koordinasi
	Rencana Aksi		1. Akan dilanjutkan identifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis /tidak sinkron selain Peraturan Daerah. 2. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan. 3. Menyusun routing slip penyusunan produk hukum. 4. Menyusun SOP Mekanisme Penyusunan Produk Hukum dengan Keputusan Walikota.				
III.PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI						5.83	97.22%
1. Evaluasi						3	94.44%

	a	Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unit organisasi b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada sebagian unit organisasi c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada unit organisasi	A	1		Kepwal no. 83 th. 2013 ttg Tim Pengarah Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Kep Ka. Bag Organisasi No. 45 Th. 2013 ttg Tim Teknis Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Dokumen Hasil Evaluasi Kelembagaan, draft perda kelembagaan
	b	Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi	a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada sebagian unit organisasi c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada unit organisasi	A	1		Dokumen Hasil Evaluasi Kelembagaan, draft perda kelembagaan
	c	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada unit kerja	A	1		Dokumen Hasil Evaluasi Kelembagaan, laporan tahunan evaluasi kelembagaan, draft perwal rincian tugas, hasil mapping tupoksi
	d	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada unit kerja	A	1		Hasil mapping tupoksi
	e	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada unit kerja	B	0.5		perwal 57 tahun 2013 (Pola Koordinasi Perangkat Daerah / Instansi Vertikal Di Pemerintah Kota Yogyakarta),
	f	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada unit kerja	A	1		Dokumen Hasil Analisis Beban Kerja, dokumen hasil evaluasi kelembagaan, draft perda kelembagaan
	g	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat	a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada unit kerja	A	1		Dokumen Hasil Evaluasi Kelembagaan. Contoh : perda kelembagaan BPBD, draft perda satpol PP
	h	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain	Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain	Ya	1		notulen, draft perwal rincian tugas, mapping tupoksi
	i	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Ya	1		notulen, draft perwal rincian tugas, mapping tupoksi, draft perda kelembagaan
	2. Penataan				3	100%	
	a	Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi d. Seluruh hasil evaluasi belum ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	A	1		Rancangan Perda Perubahan Kelembagaan sudah disampaikan ke DPRD namun belum ada pembahasan lebih lanjut

Rencana Aksi		1. Akan segera dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada sebagian unit kerja					
IV.PENATAAN TATALAKSANA					4.75	95.05%	
1. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama					1.25	83.5%	
a	Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	a. Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi b. Sebagian besar unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi c. Sebagian kecil unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi d. Seluruh unit organisasi belum memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	B	0.67			Dokumen Peta Proses Bisnis/Mekanisme Kerja
b	Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)	a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP	B	0.67			Inventarisasi data SOP
c	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	a. Seluruh unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) b. Sebagian besar unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) c. Sebagian kecil unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) d. Seluruh unit organisasi belum menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)	A	1			Perwal no. 39 th. 2012 ttg SOP, Inventarisasi data SOP
d	Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi	a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan prosedur operasional	A	1			Temuan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat, Hasil monev implementasi SOP, revisi SOP pada SKPD / unit kerja
2. E-Government					2	100%	
a	Sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi	Ya, apabila sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi	Ya	1			Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang e-Government di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Yogyakarta No... tentang e-Office.
b	Sudah dilakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll)	a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implementasi e-government	A	1			Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang e-Government di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, Data sistem aplikasi di lingkungan Pemerintah Kota Yk, contoh : Intranet, SIPKD, SIM Dalbang, SIM kepegawaian
c	Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan)	a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government	A	1			Website: Jogjakota.go.id, UPIK: upik.jogjakota.go.id

	d	Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll)	a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government	A	1		Website perizinan: perizinan.jogjakota.go.id. pembayaran PBB via ATM.
3. Keterbukaan Informasi Publik					1.5	100%	
	a	Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)	Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	Ya	1		Keputusan Sekretaris Daerah nomor 48 / Sekda / 2014 tentang Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan di Pemerintah Kota Yogyakarta, Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 335 / KEP/ 2013 tentang Penunjukan PPID
	b	Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik	a. Seluruh informasi publik telah dapat diakses b. Sebagian besar informasi publik telah dapat diakses c. Sebagian kecil informasi publik telah dapat diakses d. Seluruh informasi publik belum dapat diakses	A	1		Keputusan Sekretaris Daerah nomor 48 / Sekda / 2014 tentang Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan di Pemerintah Kota Yogyakarta , Website jogjakota.go.id
	c	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	A	1		monev dilakukan di bagian humas, dengan adanya monev UPIK
Rencana Aksi			1. Akan segera dilaksanakan agar semua unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi 2. Segera dilaksanakan agar semua peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP				
V.PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)					7.77	51.83%	
1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi					1	100%	
	a	Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan	a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian besar jabatan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian kecil jabatan d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan	A	1		Dokumen Hasil Analisa Jabatan
	b	Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan	a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian besar unit organisasi c. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan	A	1		Dokumen Hasil Analisa Jabatan
	c	Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan	ya, apabila terdapat dokumen rencana redistribusi pegawai	Ya	1		Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 110/Pem.D/BP/D.4 tgl 31 Desember 2013 ttg Penataan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Yk.
	d	Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan	ya, apabila terdapat dokumen tentang proyeksi kebutuhan 5 tahun	Ya	1		Dokumen formasi pegawai Pemerintah Kota Yk.

	e	Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan	a. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada seluruh unit organisasi b. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian besar unit organisasi c. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan belum dilakukan	A	1		Dokumen formasi pegawai Pemerintah Kota Yk.
2. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN					2	100%	
	a	Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat	a. Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media (misal: website, jejaring sosial, dsb) b. Pengumuman penerimaan diinformasikan melalui media secara terbatas (misal: papan pengumuman di kantor) c. Pengumuman penerimaan belum disebarluaskan	A	1		Pengumuman Nomor 04/Peng/BKD/XI/2010, tgl 12 Nopember 2010 ttg Pengadaan CPNS Daerah Pelamar Umum Pemerintah Kota Yk Th 2010
	b	Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online)	Ya, apabila pendaftaran dapat dilakukan secara online dan dapat segera diperoleh informasi mengenai kepastian status pendaftaran.	Ya	1		Pengumuman Nomor 04/Peng/BKD/XI/2010, tgl 12 Nopember 2010 ttg Pengadaan CPNS Daerah Pelamar Umum Pemerintah Kota Yk Th 2010
	c	Persyaratan jelas, tidak diskriminatif	Ya, apabila terdapat kejelasan persyaratan administrasi dan kompetensi. Persyaratan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat.	Ya	1		Pengumuman Nomor 04/Peng/BKD/XI/2010, tgl 12 Nopember 2010 ttg Pengadaan CPNS Daerah Pelamar Umum Pemerintah Kota Yk Th 2010
	d	Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN	Ya, apabila proses seleksi jelas kriteria dan prosesnya, tidak terjadi KKN, dan dapat dipertanggungjawabkan.	Ya	1		Pengumuman Nomor 04/Peng/BKD/XI/2010, tgl 12 Nopember 2010 ttg Pengadaan CPNS Daerah Pelamar Umum Pemerintah Kota Yk Th 2010
	e	Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka	Ya, apabila Pengumuman hasil seleksi dapat diakses oleh publik dengan mudah	Ya	1		Pengumuman Nomor 07/Peng/BKD/XII/2010, tgl 17 Desember 2010
3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi					0.83	83.33%	
	a	Telah ada standar kompetensi jabatan	Ya, apabila terdapat kebijakan tentang tentang kompetensi jabatan	Ya	1		Peraturan Walikota Yk Nomor 97 Tahun 2010
	b	Telah dilakukan <i>assessment</i> pegawai	a. Telah dilakukan asesment kepada seluruh pegawai b. Telah dilakukan asesment kepada sebagian besar pegawai c. Telah dilakukan asesment kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan assessment pegawai	C	0.33		Daftar jml pegawai yg dikirim utk mengikuti assesmen psikologi
	c	Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai	A	1		Dokumen Analisa Kebutuhan Diklat
	d	Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi	a. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi b. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian besar pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi c. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian kecil pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai	A	1		Daftar Proyeksi Diklat Tahun 2012-2016

	e	Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi	B	0.67		Daftar Proyeksi Diklat Tahun 2012-2016
	f	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	a. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi	A	1		Dokumen monitoring dan evaluasi Diklat
4. Promosi jabatan dilakukan secara terbuka					0	0%	
	a	Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan	ya, apabila terdapat kebijakan tentang promosi terbuka dan telah ditetapkan	Tidak	0		Tidak ada bukti dukung terkait hal ini
	b	Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan	a. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara nasional b. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara terbatas c. Promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi terbatas pada posisi jabatan pimpinan tinggi pratama d. Belum ada promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi	D	0		Tidak ada bukti dukung terkait hal ini
	c	Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif	Ya, apabila pelaksanaan promosi dilakukan dengan cara kompetitif dan penilaian dilakukan secara obyektif	Tidak	0		Tidak ada bukti dukung terkait hal ini
	d	Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen	Ya, apabila telah ditetapkan susunan panitia seleksi yang berasal dari pihak-pihak independen	Tidak	0		Tidak ada bukti dukung terkait hal ini
	e	Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka	Ya, apabila tahapan diumumkan secara terbuka melalui media IT seperti website panitia seleksi dsb	Tidak	0		Tidak ada bukti dukung terkait hal ini
5. Penetapan kinerja individu					1.36	67.86%	
	a	Penerapan Penetapan kinerja individu	a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar pegawai c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil pegawai d. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu yang telah dilakukan	A	1		Pemkot Yk saat ini sdh menerapkan SKP sesuai dg PP 46 th 2011, blm menerapkan SKI krn blm ada dasar hukum yg mengatur ttg pelaksanaan SKI. Dokumen SKP th 2014
	b	Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	a. Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi b. Sebagian besar pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi c. Sebagian kecil pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi d. Belum ada pegawai yang melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	A	1		Di Pemkot Yk sdh menerapkan SKP yg terkait dg kinerja organisasi. Rekap hasil penilaian kinerja pegawai (SKP).
	c	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	a. Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya b. Sebagian besar pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya c. Sebagian kecil pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya d. Seluruh pegawai belum memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya	A	1		Tapkin, DPA, Renja, RKT, SKP
	d	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan	D	0.25		Rekap hasil penilaian kinerja pegawai.

	e	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.	a. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara berkala b. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tidak berkala c. Belum ada monev pencapaian kinerja individu	B	0.5		Rekap hasil penilaian kinerja pegawai.
	f	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu	a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian besar pegawai c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian kecil pegawai d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai	A	1		Dokumen Penilaian Kinerja Individu
	g	Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja	a. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai b. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian besar pegawai c. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian kecil pegawai d. Capaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai	D	0		Pemkot Yk belum menerapkan pemberian tunjangan kinerja, yang ada pemberian tambahan penghasilan pegawai.
6. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai					0.92	91.75%	
	a	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan	ya, apabila terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku	Ya	1		Peraturan Walikota Yk Nomor 76 Th 2004 ttg Penetapan Kode Etik Pemerintah Kota Yk.
	b	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan	a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi b. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian besar unit organisasi c. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian kecil unit organisasi d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi	A	1		Peraturan Walikota Yk Nomor 76 Th 2004 ttg Penetapan Kode Etik Pemerintah Kota Yk.
	c	Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi tidak berkala c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	A	1		Program Kerja Pengawasan Tahunan
	d	Adanya pemberian sanksi dan imbalan (<i>reward</i>)	a. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (<i>reward</i>) kepada seluruh unit organisasi b. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (<i>reward</i>) kepada sebagian besar unit organisasi c. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (<i>reward</i>) kepada sebagian kecil unit organisasi d. Belum ada pemberian sanksi dan imbalan (<i>reward</i>) kepada unit organisasi	B	0.67		Data PNS yg dijatuhi hukuman disiplin. SPJ TPP setiap bulan di masing-masing SKPD.
7. Pelaksanaan evaluasi jabatan					0.67	66.67%	
	a	Informasi faktor jabatan telah disusun	Ya, apabila terdapat dokumen tentang penyusunan Faktor Jabatan	Ya	1		Dokumen hasil analisa jabatan
	b	Peta jabatan telah ditetapkan	a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan peta jabatan b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan peta jabatan c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan peta jabatan d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan peta jabatan	A	1		Dokumen Peta Analisa Jabatan
	c	Kelas jabatan telah ditetapkan	a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan kelas jabatan	D	0		Pemkot Yk sudah mengirimkan hasil evaluasi jabatan ke Menpan RB, tetapi sampai saat ini hasil validasi blm turun
8. Sistem Informasi Kepegawaian					1	100%	

	a	Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan	Ya, apabila terdapat sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan	Ya	1		Peraturan Walikota Yk Nomor 58 Th 2012 ttg Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pemerintah Kota Yk.
	b	Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai	Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian	Ya	1		Peraturan Walikota Yk Nomor 58 Th 2012 ttg Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pemerintah Kota Yk.
	c	Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan	a. Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian b. Sebagian besar unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian c. Sebagian kecil unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian d. Seluruh unit organisasi belum memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian	A	1		Peraturan Walikota Yk Nomor 58 Th 2012 ttg Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pemerintah Kota Yk.
	d	Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM	Ya, apabila sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM	Ya	1		Keputusan Walikota Yk Nomor 110/Pem.D/BP/D.4, tgl 31 Desember 2013 ttg Penataan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Yk.

		Rencana Aksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segera akan dilakukan pelaksanaan <i>assessment</i> kepada seluruh pegawai 2. Akan dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi 3. Segera akan dilaksanakan Kebijakan promosi secara terbuka 4. Direncanakan mekanisme melalui promosi terbuka untuk merekrut jabatan pimpinan tinggi 5. Pelaksanaan Promosi terbuka akan dilakukan secara kompetitif dan obyektif oleh panitia seleksi yang independen, dan setiap tahapan seleksi akan diumumkan secara terbuka 6. akan dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara berkala 7. Capaian kinerja individu akan dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja pegawai 8. akan diberlakukan pemberian sanksi dan imbalan (<i>reward</i>) kepada seluruh unit organisasi secara berimbang 				
--	--	---------------------	---	--	--	--	--

VI. Penguatan Akuntabilitas					4.66	77.73%	
1. Keterlibatan pimpinan					2	100%	
	a	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	A	1		Perda No 7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2016
	b	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	A	1		Hasil Usulan Tapkin SKPD yang dikirim ke Bag Tapem
	c	Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	a. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala b. Sebagian besar pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala c. Sebagian kecil pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala d. Seluruh pimpinan belum memantau pencapaian kinerja secara berkala	A	1		LAKIP SKPD, Monev Capaian Sasaran yang dikirim ke Tapem, Hasil Evaluasi Renja, Lap Bulanan dan Tribunalan SKPD
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja					2.66	66.6%	

	a	Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	a. Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja b. Sebagian besar unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja c. Sebagian kecil unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja d. Seluruh unit organisasi belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	A	1		Pendampingan penyusunan renja, IKU, LAKIP	
	b	Apakah pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun	Ya, apabila terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja	Ya	1		Perwal Kota Yk no 88 tahun 2011 ttg Pedoman Penyusunan LAKIP	
	c	Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik	a. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan terintegrasi b. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi c. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum implementasi d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik	C	0.33		SPK dengan pihak ketiga terkait pembangunan sistem e-LAKIP	
	d	Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit	a. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi b. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi c. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi	D	0		Belum ada bukti dukung yang terkait	
	e	Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala	a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan e. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan	A	1		Laporan bulanan pada SIM pelaporan Bag. Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yk	
	Rencana Aksi		1. Akan segera dirancang Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik					
			2. Segera dibangun Sistem pengukuran kinerja yang dapat diakses oleh seluruh unit organisasi					
VII. Penguatan Pengawasan					7.97	66.42%		
1. Gratifikasi					0.75	50%		
	a	Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi	Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi	Ya	1		Perwal Yk no 82 th 2013 ttg Pedoman Pengendalian Gratifikasi	
	b	Telah dilakukan public campaign	a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign	B	0.5		Sosialisasi Perwal Yk no 82 th 2013 tahap I tgl 29 April 2014 bagi SKPD/ unit kerja dan tahap II 25/26 November 2014 bagi sekolah2 dan BUMD	
	c	Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan	Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi	Ya	1		Kepwal Yk Yk No 47 th 2014 Pembentukan Tim Pelaksana kegiatan Kormonev PPK lampiran VIII Komite Pengendali Gratifikasi dan lampiran IX Sekretariat Pengendali Gratifikasi	
	d	Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Tidak	0		Belum ada bukti dukung	
	e	Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti	Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut	Tidak	0		Belum ada bukti dukung	
2. Penerapan SPIP					1.42	94.5%		
	a	Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP	Ya, apabila ada peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP	Ya	1		Keputusan Walikota No. 482 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP	

	b	Telah dibangun lingkungan pengendalian	a. Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian b. Sebagian organisasi telah membangun lingkungan pengendalian c. Seluruh organisasi belum membangun lingkungan pengendalian	A	1		Kepwal Yk no 76 tahun 2004 ttg Kode Etik Pegawai, Perwal Yk no 39 tahun 2012 ttg Penyusunan SOP Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemkot Yk, Dibentuk satgas SPIP Pemkot Yk dan satgas SPIP di seluruh SKPD
	c	Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi	a. Seluruh organisasi telah melaksanakan penilaian risiko b. Sebagian besar organisasi telah melaksanakan penilaian risiko c. Sebagian kecil organisasi telah melaksanakan penilaian risiko d. Seluruh organisasi belum melaksanakan penilaian risiko	A	1		Dokumen hasil penilaian risiko Dokumen hasil monev SPIP Th 2014
	d	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	a. Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi b. Sebagian besar organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi c. Sebagian kecil organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi d. Seluruh organisasi belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	B	0.67		Dokumen RTP, Dokumen hasil monev SPIP Th 2014
	e	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil pihak terkait d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI	A	1		Sosialisasi PP no 60 th 2008 pada seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Yk, audit SPI pada setiap pemeriksaan regulier
	f	Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern	a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern	A	1		Dokumen hasil monev SPIP
3. Pengaduan Masyarakat					2	100%	
	a	Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat	Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan	Ya	1		Perwal Yk no 38 th 2009 ttg Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat
	b	Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	a. Seluruh unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat b. Sebagian besar unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat c. Sebagian kecil unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat d. Seluruh unit organisasi belum mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat	A	1		SOP Unit Pengelola Informasi dan Keluhan, Kegiatan Penelitian dan Penelaahan Informasi
	c	Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti d. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti	A	1		SOP Unit Pengelola Informasi dan Keluhan, Kegiatan Penelitian dan Penelaahan Informasi (PPI), SOP PPI, Laporan PPI, Kegiatan Pemeriksaan Khusus Th 2014
	d	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan pengaduan masyarakat belum dimonitoring dan dievaluasi	A	1		Dokumen hasil monev penanganan pengaduan, koordinasi berkala kemajuan PPI Th 2014
	e	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	Ya	1		Dokumen laporan PPI Th 2014
4. Whistle-Blowing System					0.3	20%	

	a	Telah terdapat Whistle Blowing System	Ya, apabila terdapat kebijakan tentang Whistle Blowing System	Ya	1		Sistem WBS secara IT telah selesai dibangun, namun untuk Perwalnya masih dlm proses pembahasan.
	b	Whistle Blowing System telah disosialisasikan	a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh organisasi b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar organisasi c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil organisasi d. Whistle blowing system belum disosialisasikan ke seluruh organisasi	D	0		Belum ada bukti dukung
	c	Whistle Blowing System telah diimplementasikan	Ya, apabila kebijakan whistle blowing system telah diimplementasikan	Tidak	0		Belum ada bukti dukung
	d	Telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing System	a. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System	C	0		Belum ada bukti dukung
	e	Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	a. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti d. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti	D	0		Belum ada bukti dukung
5. Penanganan Benturan Kepentingan					0	0%	
	a	Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan	Ya, apabila terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan	Tidak	0		baru disusun draft perwal ttg Penanganan Benturan Kepentingan
	b	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan	a. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke seluruh unit organisasi b. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke sebagian besar unit organisasi c. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke sebagian kecil unit organisasi d. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan ke seluruh unit organisasi	D	0		baru disusun draft perwal ttg Penanganan Benturan Kepentingan
	c	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Tidak	0		baru disusun draft perwal ttg Penanganan Benturan Kepentingan
	d	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan Benturan Kepentingan belum dimonitoring dan evaluasi	C	0		baru disusun draft perwal ttg Penanganan Benturan Kepentingan
	e	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti d. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan belum ditindaklanjuti	D	0		baru disusun draft perwal ttg Penanganan Benturan Kepentingan
6. Pembangunan Zona Integritas					2.25	90%	
	a	Telah dilakukan penancangan zona integritas	Ya, apabila terdapat Dokumen Pencanaan Zona Integritas ditandatangani sesuai ketentuan	Ya	1		Dokumen penancangan ZI tgl 12 Juli 2012
	b	Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas	Ya, apabila ada Surat Keputusan Tentang unit yang ditetapkan	Ya	1		Penunjukan 10 SKPD sebagai sampling
	c	Telah dilakukan pembangunan zona integritas	a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif b. Pembangunan zona integritas dilakukan tidak secara intensif c. Belum ada pembangunan zona integritas	A	1		Sosialisasi ZI, Pembangunan dan implementasi pengendalian Gratifikasi, penyusunan aturan perilaku, pembacaan kode etik setiap apel pagi hari senin
	d	Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan	a. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Zona integritas yang telah ditentukan belum dimonitoring dan dievaluasi	A	1		Dokumen hasil evaluasi ZI th 2012-2014

	e	Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai "menuju WBK/WBBM"	a. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBBM b. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK c. Belum terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK	B	0.5		Telah ada 2 SKPD yaitu Dinas Perizinan dan Kantor Pengelolaan Taman Pintar yang mendapat penghargaan dari KemenPAN RB sebagai berpredikat WBK th 2014
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)					1.25	83.5%	
	a	Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan	a. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir b. Sebagian rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir c. Sebagian kecil rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir d. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan belum ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir	A	1		Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan th 2014
	b	APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas.	a. Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas	B	0.67		Dokumen hasil leveling tatakelola APIP catatan : utk kuantitas dukungan PFA <30% hasil anjab
	c	APIP didukung dengan anggaran yang memadai	a. Seluruh kebutuhan didukung oleh anggaran b. Sebagian besar kebutuhan didukung oleh anggaran c. Sebagian kecil kebutuhan didukung oleh anggaran d. Seluruh kebutuhan belum didukung oleh anggaran	B	0.67		DPA Inspektorat, Laporan hasil kegiatan Inspektorat
	d	APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko	a. Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum berfokus pada client dan audit berbasis risiko	A	1		Perwal No. 432 Tahun 2014 ttg Program Kerja Pengawasan Tahunan untuk tahun 2015
	Rencana Aksi		1. Akan dilaksanakan public campaign terkait dengan Pengendalian Gratifikasi secara rutin 2. Akan dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi, dan hasilnya akan segera ditindaklanjuti 3. Akan dilakukan kegiatan pengendalian kepada seluruh organisasi untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi 4. Segera akan diselesaikan penyusunan kebijakan terkait dengan <i>Whistle Blowing System yang pada saat ini masih dalam proses pembahasan</i> 5. <i>Segera akan diselesaikan penyusunan kebijakan</i> Penanganan Benturan Kepentingan, yang pada saat ini tinggal menunggu legalisasi (penandatanganan) dari Walikota 6. Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai "menuju WBK" yaitu Dinas Perizinan dan Kantor Pengelolaan Taman Pintar, sehingga untuk tahun 2015 akan diambil sampel SKPD/Unit Kerja untuk "menuju WBBM" 7. APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas, sedangkan untuk kuantitas belum sepenuhnya memadai termasuk untuk dukungan anggaran belum semua kebutuhan APIP didukung dengan anggaran yang memadai. Diupayakan untuk pemenuhan jumlah APIP yang berkompeten dengan mengusulkan kepada Walikota untuk dilakukan penambahan SDM APIP yang berkompeten termasuk dukungan anggaran.				
VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK					5.72	95.4%	
1. Standar Pelayanan					0.9	90%	
	a	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Ya, apabila telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan perijinan	Ya	1		Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Juklak Perda Nomor 7 Tahun 2011 yaitu Perwal No. 80 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

	b	Standar pelayanan telah dimaklumkan	a. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan b. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar jenis pelayanan c. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan d. Standar pelayanan belum dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan	A	1		Maklumat pelayanan public di SKPD/ unit kerja , contoh : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 50 /KEP/DINZIN/2013. TENTANG MAKLUMAT / JANJI PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA
	c	Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	a. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan b. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian besar jenis pelayanan c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian kecil jenis pelayanan d. Belum terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	A	1		Dokumen rekapitulasi SOP SKPD, penetapan SOP di masing-masing SKPD, contoh SOP Pengajuan Bansos/Hibah diatur dengan KepWal 207/KEP/2013 di DPDPK
	d	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara tidak berkala dan/atau tidak dengan melibatkan stakeholders c. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	B	0.5		hasil monev kepatuhan UU 25 tahun 2009 untuk SKPD/unit kerja pelayanan publik, penilaian kinerja pelayanan public, Dokumen reviu SPP
	e	Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP	a. Dilakukan reviu dan perbaikan SOP secara berkala b. Dilakukan reviu dan SOP secara tidak berkala c. Belum ada reviu dan perbaikan SOP	A	1		Dokumen reviu SOP, Laporan hasil monev, revisi SOP SKPD/unit kerja
2. Budaya Pelayanan Prima					0.93	93.4%	
	a	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima)	a. Seluruh sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima d. Seluruh sosialisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	B	0.67		sertifikat service excellent, laporan kegiatan forkompanda
	b	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb) c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media	A	1		jogjakota.go.id, media cetak info kota, dialog interaksi di TV lokal dan acara radio Walikota Menyapa setiap senin dan kamis, info layanan di setiap unit layanan pada papan informasi, banner, leaflet
	c	Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	A	1		Perda Kota Yk no 7 th 2011 ttg Pelayanan Publik Catatan hasil verifikasi belum terdapat system reward and punishment
	d	Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu	A	1		Perwal nomor 20 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta, perizinan yang terpadu pada dinas perizinan, pelayanan di Dinsosakertrans dalam 1 atap, PATEN di Kecamatan

	e	Terdapat inovasi pelayanan	Ya, apabila terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima pelayanan	Ya	1		Rumah Sehat Lansia, Bank Buku, Taman Pintar, Rumah Pemulihan Gizi, Gerai Investasi, Yogyakarta Emergency Service (YES), inovasi layanan perizinan pada Dinas Perizinan
3. Pengelolaan Pengaduan					1.5	100%	
	a	Terdapat media pengaduan pelayanan	Ya, apabila telah ditetapkan media pengaduan pelayanan secara jelas dan terbuka	Ya	1		website upik.jogjakota.go.id, kotak aduan di setiap unit layanan, sms 08122780001
	b	Terdapat SOP pengaduan pelayanan	a. Terdapat SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan namun belum seluruhnya c. Belum ada SOP pengaduan pelayanan	A	1		Perwal No 38 Th 2009 ttg penanganan pengaduan masyarakat, Perwal ttg UPIK
	c	Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan	ya, apabila telah ditetapkan unit pengelola pengaduan	Ya	1		Perwal ttg UPIK
	d	Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan d. Belum dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	A	1		SOP UPIK Dokumen hasil pemantauan tindak lanjut pengaduan
	e	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan	a. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan tidak berkala c. Belum ada evaluasi penanganan keluhan / masukan	A	1		Dokumen hasil pemantauan tindak lanjut pengaduan
4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan					1.5	100%	
	a	Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	A	1		Dokumen hasil pengukuran IKM dan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
	b	Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Ya, apabila tersedia media untuk mengakses data hasil survey dengan mudah	Ya	1		jogjakota.go.id di bagian Tautan lalu dapat klik di IKM 2014
	c	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	A	1		Dokumen tindak lanjut hasil survei
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi					0.89	89%	
	a	Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	Ya, apabila ada rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	Ya	1		Perwal eGOVERNMENT No 78 Tahun 2007, contoh website Dinas Perizinan
	b	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	a. Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan b. Sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan c. Sebagian kecil pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan d. Seluruh pelayanan belum menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	B	0.67		perizinan lewat perizinan.jogjakota.go.id, Pajak Bumi Bangunan lewat atm perbankan
	c	Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan	A	1		Dokumen hasil monitoring dan evaluasi TI pelayanan
Rencana Aksi			1. Akan dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan/atau dengan melibatkan stakeholders 2. Akan dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima) 3. Dalam memberikan pelayanan akan menerapkan teknologi informasi				

B.HASIL				28.67	71.66%	
I. KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI				13.6	67.98%	
	1.Nilai Akuntabilitas Kinerja	Diisi dengan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (0 - 100)	65.57	9.18		Surat Kemenpan RB No. B/4742/D.1.PANRB/12/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
	2.Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal)	Diisi dengan nilai hasil Survei Internal Kapasitas Organisasi (0 - 5)	3.68	4.416		Hasil survei internal SKPD
	Rencana Aksi	1. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja secara menyeluruh. 2. Meningkatkan nilai kapasitas organisasi.				
II. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN				7.3	72.95%	
	1.Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi (0 - 4)	2.74	4.795		Hasil Penelitian Indonesia Governance Index (IGI) yang dimuat dalam Berita Nasional 15 Oktober 2014
	2.Opini BPK	Wajar Tanpa Pengecualian WTP-Dengan Paragraph Penjelas Wajar Dengan Pengecualian Tidak Memberikan Pendapat Tidak Wajar Tidak Memiliki Laporan Keuangan	WTP-Dengan Paragraph Penjelas	2.5		LHP BPK no 07B/LHP/XVIII.YOG/05/2014 dan 07C/LHP/XVIII.YOG/05/2014 tanggal 22 Mei 2014
	Rencana Aksi	1. meningkatkan hasil penilaian survey eksternal terkait persepsi korupsi diantaranya partisipasi aktif, penegakkan hukum, transparansi, responsif, berorientasi akan musyawarah untuk mendapatkan mufakat, keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang, efektif dan ekonomis dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. meningkatkan tata kelola keuangan dan barang agar dicapai opini WTP tanpa Paragraf Penjelas.				
III. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				7.78	77.75%	
	1.Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan (0 - 4)	3.11	7.775		IKM SKPD Pelayanan Publik Tahun 2014.
	Rencana Aksi	Meningkatkan nilai persepsi kualitas pelayanan terhadap SKPD pelayanan publik dengan mengevaluasi thd hasil penilaian yg masih kurang.				
INDEKS RB (Total)				75.38		

*) Tahap Penilaian :

1. Masih dalam proses koordinasi penilaian atau perbaikan penilaian di ispektorat
2. Sudah disampaikan ke Ketua Tim RB Instansi
3. Sudah dikirim ke Kementerian PAN dan RB